



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.

8. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
9. Pendapatan Transer Antar Daerah adalah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
11. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
13. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Belanja Barang dan Jasa adalah pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
15. Belanja Bunga adalah pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Belanja Hibah adalah hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan - 50 - belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Belanja Bantuan Sosial adalah Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
18. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

19. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
20. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
21. Belanja Bagi Hasil adalah digunakan untuk menganggarkan bagi hasil kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah.
22. Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.393.013.211.900 (*satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga milyar tiga belas juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.291.482.330.100 (*dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.650.000.000 (*sembilan puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.815.223.900 (*tiga puluh empat milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.876.150.000 (*tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.147.140.956.200 (*seratus empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.650.000.000 (*sembilan puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak hotel Rp.4.500.000.000 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*).
 - b. Pajak restoran Rp.5.700.000.000 (*lima milyar tujuh ratus juta rupiah*).
 - c. Pajak hiburan Rp.750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
 - d. Pajak reklame Rp.2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).
 - e. Pajak penerangan jalan Rp.27.000.000.000 (*dua puluh tujuh milyar rupiah*).
 - f. Pajak parkir Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).
 - g. Pajak air tanah Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*).
 - h. Pajak sarang burung walet Rp.5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*).
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp.8.000.000.000 (*delapan milyar rupiah*).
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp.16.000.000.000 (*enam belas milyar rupiah*).
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.25.000.000.000 (*dua puluh lima milyar rupiah*).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.815.223.900 (*tiga puluh empat milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi jasa umum Rp.13.479.528.000 (*tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
 - b. Retribusi jasa usaha Rp.12.563.749.000 (*dua belas milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
 - c. Retribusi perizinan tertentu Rp.8.771.946.900 (*delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.876.150.000 (*tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.147.140.956.200 (*seratus empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
 - b. Jasa Giro Rp.2.273.833.000 (*dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*);
 - c. Pendapatan Bunga Rp.2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*);
 - d. Pendapatan Denda Pajak Rp.358.856.200 (*tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah*);
 - e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp.32.100.000 (*tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah*);
 - f. Pendapatan dari Pengembalian Rp.1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
 - g. Pendapatan BLUD Rp.140.226.167.000 (*seratus empat puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.041.458.929.000 (*satu triliun empat puluh satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.958.458.929.000 (*sembilan ratus lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.000.000.000 (*delapan puluh tiga milyar rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.958.458.929.000 (*sembilan ratus lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana perimbangan Rp.874.613.399.000 (*delapan ratus tujuh puluh empat milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
 - b. Dana Insentif Daerah Rp.13.214.332.000 (*tiga belas milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
 - c. Dana Desa Rp.70.631.198.000 (*tujuh puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.000.000.000 (*delapan puluh tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.60.071.952.800 (*enam puluh milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.358.000.000 (*satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah*);
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.713.952.800 (*lima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.358.000.000 (*satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
- (2) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.713.952.800 (*lima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain pendapatan Rp.41.154.000.000 (*empat puluh satu milyar seratus lima puluh empat juta rupiah*)
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp.17.559.952.800 (*tujuh belas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*)

Pasal 10

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.361.138.069.100 (*satu triliun tiga ratus enam puluh satu milyar seratus tiga puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.957.393.520.872 (*sembilan ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.574.204.679.621 (*lima ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.347.182.232.656 (*tiga ratus empat puluh tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.650.000.000 (*satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.717.608.595 (*tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.639.000.000 (*satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.574.204.679.621 (*lima ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.278.089.203.746 (*dua ratus tujuh puluh delapan milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ratus empat puluh enam rupiah*).

- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.126.980.949.309 (*seratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.71.741.826.190 (*tujuh puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.13.627.795.300 (*tiga belas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp.675.597.000 (*enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp.801.600.000 (*delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp.6.948.391.000 (*enam milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp.75.339.317.076 (*tujuh puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh enam rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.347.182.232.656 (*tiga ratus empat puluh tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.68.484.197.472 (*enam puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.130.632.629.628 (*seratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.17.859.876.334 (*tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.46.082.973.415 (*empat puluh enam milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp.11.223.443.600 (*sebelas milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp.12.945.601.290 (*dua belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp.59.953.510.917 (*lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.650.000.000 (*satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.717.608.595 (*tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.1.600.000.000 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*).

- (3) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.21.525.768.595 (*dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (4) Hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.641.360.000 (*tujuh milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (5) Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.1.950.480.000 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.639.000.000 (*satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.1.259.000.000 (*satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah*).
- (3) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.380.000.000 (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.246.546.432.328 (*dua ratus empat puluh enam milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.381.008.500 (*tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.078.392.819 (*lima puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.86.531.734.341 (*delapan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.99.494.914.118 (*sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu seratus delapan belas rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.060.382.550 (*satu milyar enam puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 18

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.078.392.819 (*lima puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan ;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal alat peraga;
 - l. Belanja modal peralatan olahraga;
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.197.140.091 (*seratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.749.816.572 (*sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.109.584.498 (*seratus sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.65.148.666 (*enam puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja modal kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.369.930.529 (*delapan milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (7) Belanja modal studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.193.099.970 (*empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (8) Belanja modal kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.365.509.019 (*lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan ribu sembilan belas rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar huruf h Rp.10.587.244.094 (*sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.023.206.279 (*tiga milyar dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (11) Belanja modal keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.176.257.421 (*seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu*).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.22.807.970 (*dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.13.618.647.710 (*tiga belas milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.86.531.734.341 (*delapan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal bangunan menara;
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
- (2) Belanja bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.83.364.231.273 (*delapan puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
 - (3) Belanja bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.214.159.261 (*dua ratus empat belas juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*).
 - (4) Belanja modal tugu titik kontrol / pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.520.004.800 (*lima ratus dua puluh juta empat ribu delapan ratus rupiah*).
 - (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.2.433.339.007 (*dua milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh rupiah*)

Pasal 20

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.99.494.914.118 (*sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu seratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal Instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.82.807.348.882 (*delapan puluh dua milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.472.713.324 (*sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.977.820.128 (*sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.237.031.784 (*lima milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).

Pasal 21

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.060.382.550 (*satu milyar enam puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga;
 - c. Belanja modal biota perairan;
 - d. Belanja modal aset tidak berwujud
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.178.186.000 (*seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.757.196.550 (*tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.559.675.000 (*empat milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp.152.638.440.900 (*seratus lima puluh dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.684.632.000 (*tiga belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.138.953.808.900 (*seratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 24

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.684.632.000 (*tiga belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.994.780.000 (*sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.689.852.000 (*tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.138.953.808.900 (*seratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan keuangan antar daerah Provinsi;
 - b. Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja bantuan keuangan antar daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.245.000.000 (*dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.138.708.808.900 (*seratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 26

- Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.31.875.142.800 (*tiga puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp.21.124.857.200 (*dua puluh satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 28

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 direncanakan sebesar Rp.21.124.857.200 (*dua puluh satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - b. Penghematan belanja;
 - c. Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.321.921.000 (*enam belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.302.936.200 (*tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp.53.000.000.000 (*lima puluh tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.000.000.000 (*tiga puluh tiga milyar rupiah*).

Pasal 30

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 31

Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.000.000.000 (*tiga puluh tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp.31.875.142.800 (*tiga puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.31.875.142.800 (*tiga puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Desember 2021
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021
NOMOR 50



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG WAHYUSUF, SH

NIP. 19760904 2000501 1 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	291.482.330.100
4.1.01	Pajak Daerah	95.650.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.500.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.345.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.345.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	150.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	150.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.700.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.142.093.900
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.142.093.900
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.904.483.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.904.483.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	901.650.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	901.650.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	50.100.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	50.100.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	701.673.100
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	701.673.100
4.1.01.08	Pajak Hiburan	750.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	200.000.000

4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	200.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	250.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	250.000.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	20.000.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	20.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	120.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	120.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	160.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	160.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.500.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.100.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.100.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	350.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	350.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	27.000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.500.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.500.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	25.500.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	25.500.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.000.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.000.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	1.000.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	200.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	200.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.000.000.000

4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	3.500.000.000
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	3.500.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.500.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.500.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	16.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	16.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.637.400.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.637.400.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	19.362.600.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	19.362.600.000
4.1.02	Retribusi Daerah	34.815.223.900
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	13.479.528.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.400.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.237.411.000
4.1.02.01.01.0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	387.589.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	775.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	236.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	271.254.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	4.492.746.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	100.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	329.528.000

4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	329.528.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	12.563.749.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.156.327.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	372.200.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	60.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.090.627.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	925.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	108.500.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	3.600.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.350.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2.350.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	392.514.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	392.514.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.000.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.000.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	964.908.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	214.593.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	150.315.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	600.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.771.946.900
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.453.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.453.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.500.000
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	1.500.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	617.964.200
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	617.964.200
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.148.029.700
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.148.029.700
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.876.150.000

4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	13.876.150.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.876.150.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.876.150.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	147.140.956.200
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	750.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	550.000.000
4.1.04.01.02.0001	Hasil Penjualan Alat Besar	250.000.000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	300.000.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	200.000.000
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	200.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	2.273.833.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	273.833.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	273.833.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.000.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	358.856.200
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	114.090.000
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	113.890.000
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	100.000
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	100.000
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	5.177.200
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.977.200
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.000.000
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	100.000
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	100.000
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	200.000
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	100.000
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	100.000

4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	11.409.000
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	11.359.000
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	50.000
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	7.000.000
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.000.000
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	100.000
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	100.000
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	50.000
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	50.000
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	250.000
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	250.000
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000
4.1.04.12.14.0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit	100.000
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	220.180.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	220.180.000
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.000
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	100.000
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	32.100.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	8.289.000
4.1.04.13.01.0004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.087.000
4.1.04.13.01.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	4.202.000
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	23.811.000
4.1.04.13.03.0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	23.811.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.500.000.000
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	300.000.000
4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	300.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.200.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.200.000.000

4.1.04.16	Pendapatan BLUD	140.226.167.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	140.226.167.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	140.226.167.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.041.458.929.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	958.458.929.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	874.613.399.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	84.720.934.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	36.889.223.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	11.298.941.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	808.825.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	196.378.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	27.194.718.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.414.023.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	593.355.915.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	593.355.915.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112.235.300.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.718.858.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	21.023.449.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	18.931.633.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.143.260.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.930.959.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	944.963.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	510.026.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	857.880.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	6.291.604.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	26.862.522.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.920.513.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.083.429.000

4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	15.895.705.000
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.120.499.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	84.301.250.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	54.613.633.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.167.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	977.140.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.491.200.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.427.850.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.956.108.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	13.958.113.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	54.635.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.994.600.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	426.571.000
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	782.600.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	13.214.332.000
4.2.01.02.01	DID	13.214.332.000
4.2.01.02.01.0001	DID	13.214.332.000
4.2.01.05	Dana Desa	70.631.198.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	70.631.198.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	70.631.198.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	83.000.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	83.000.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	83.000.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.500.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.000.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.000.000.000

4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	75.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	13.425.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	60.071.952.800
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.358.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.358.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.358.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.358.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	58.713.952.800
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	41.154.000.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	41.154.000.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	41.154.000.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	17.559.952.800
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.559.952.800
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	17.559.952.800
	Jumlah Pendapatan	1.393.013.211.900
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	957.393.520.872
5.1.01	Belanja Pegawai	574.204.679.621
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	278.089.203.746
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	205.649.302.302
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	201.500.672.302
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	4.148.630.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.680.496.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	19.099.687.000
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	580.809.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.024.730.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.024.730.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.385.532.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.385.532.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.169.276.000

5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.902.506.000
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	266.770.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.717.402.720
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.311.849.720
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	405.553.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.154.263.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.134.563.000
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	19.700.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.478.508
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.339.508
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	139.000
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	13.535.937.608
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	13.289.232.608
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	246.705.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	442.205.648
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	430.854.648
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	11.351.000
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.326.579.960
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.292.527.960
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	34.052.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	126.980.949.309
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	62.412.709.300
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	61.303.932.000
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.108.777.300
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	534.256.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	534.256.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	552.139.277
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	552.139.277
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	8.459.800.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	8.459.800.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	55.022.044.732

5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	54.959.404.732
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	62.640.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	71.741.826.190
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	54.613.633.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	54.613.633.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	977.140.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	977.140.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.167.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.167.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	14.396.268.190
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	14.396.268.190
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	587.785.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	570.385.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.627.795.300
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	74.206.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	74.206.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	98.347.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	98.347.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.096.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.096.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.869.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.869.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.241.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.241.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000

5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	23.300
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	23.300
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.329.217.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	58.975.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.382.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.146.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.264.714.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.596.400.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.596.400.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	675.597.000
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.112.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.112.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.005.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.005.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.504.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.504.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	337.000

5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	337.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	500.000.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	30.240.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	36.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	5.400.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	16.560.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	80.000.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	5.400.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.440.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	36.000.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	57.600.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	151.360.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	6.948.391.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	6.948.391.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	6.948.391.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	75.339.317.076
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	75.339.317.076
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	75.339.317.076
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.182.232.656
5.1.02.01	Belanja Barang	68.484.197.472
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.274.801.179
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	887.216.391
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.173.600.950
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.658.903.798
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	126.891.210

5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	71.875.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	178.938.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	55.470.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.711.151.223
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	415.679.757
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	108.945.500
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.000.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	319.968
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	88.080.548
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.898.952.782
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.766.570.438
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.797.032.974
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	317.796.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	205.477.405
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.091.334.876
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	624.138.587
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	22.006.680
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	786.653.880
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	112.642.474
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	119.687.491
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.572.952.142
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	29.074.296
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.415.113.790
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	49.538.405
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	9.108.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.549.938.270
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	422.549.250
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	7.825.000
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	870.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.621.568.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	718.876.000

5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	152.800.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	4.984.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.920.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	33.296.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.118.690.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	47.795.430
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	150.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.108.730.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	336.788.447
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	151.556.217
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	19.250.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	99.750.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	277.282.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	148.180.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	209.396.293
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	13.350.004
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	196.046.289
5.1.02.02	Belanja Jasa	130.632.629.628
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	89.623.959.358
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.712.415.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	513.300.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	183.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	493.200.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.643.200.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	246.400.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.768.147.500
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.652.743.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	663.197.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.966.595.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.185.680.000

5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	590.480.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.167.800.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	87.750.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	278.091.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	889.482.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.420.131.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	315.370.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	59.926.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.092.263.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.134.840.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	450.900.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	704.630.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.821.566.600
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.790.870.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.656.882.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	315.396.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	88.094.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	45.600.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	23.400.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	385.259.000
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	81.070.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.630.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	2.100.000
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	22.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	526.510.200
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	160.200.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	65.151.244
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	96.681.200
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	79.055.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	480.211.100
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.293.875.000

5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	294.693.152
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	620.384.096
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.874.597.857
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	553.770.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.013.490.640
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	76.809.199
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	90.050.500
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	434.858.070
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	340.634.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	165.580.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	27.028.583.850
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	799.730.400
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	21.000.000.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	1.680.000.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.830.476.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	197.832.150
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	226.395.300
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	294.150.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.877.941.000
5.1.02.02.04.0002	Belanja Sewa Grader	467.000.000
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	493.000.000
5.1.02.02.04.0006	Belanja Sewa Asphalt Equipment	126.000.000
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	133.301.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	20.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	261.405.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	88.600.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	73.050.000
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	490.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	190.700.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	273.515.000
5.1.02.02.04.0120	Belanja Sewa Alat Pembersih	30.000.000

5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.400.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	22.470.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	5.000.000
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	3.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	697.974.300
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	137.828.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	38.500.000
5.1.02.02.05.0013	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	35.200.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	87.035.000
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	337.700.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	61.711.300
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.177.200.000
5.1.02.02.08.0011	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	100.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	2.427.200.000
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	200.000.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	100.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	350.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.970.280.000
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	275.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.070.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.456.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	169.280.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	166.075.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	166.075.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	544.356.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	184.296.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	360.060.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.546.260.120
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.106.505.120
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.454.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	985.755.000

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.859.876.334
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.949.705.859
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	128.800.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	126.600.000
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	125.692.000
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	42.889.500
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	55.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	18.956.800
5.1.02.03.02.0030	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	1.780.210
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	556.679.295
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.504.566.536
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	413.640
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	399.175.698
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.890.930
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	31.529.900
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	91.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	174.112.100
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	23.750.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	408.197.250
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46.500.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	19.100.000
5.1.02.03.02.0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	12.000.000
5.1.02.03.02.0196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	14.010.000
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	24.000.000
5.1.02.03.02.0244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	24.875.000
5.1.02.03.02.0245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	24.000.000
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	28.250.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	461.134.500
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	40.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	372.215.500
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	103.337.000

5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	67.500.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	20.750.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.210.102.100
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.528.925.973
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	55.000.000
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	20.000.000
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	75.970.700
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	502.201.730
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	28.003.697
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.700.068.375
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.936.663.375
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	730.000.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.900.055.000
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.718.500.000
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	414.850.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	46.082.973.415
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.082.973.415
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.447.312.832
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.217.304.220
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	734.900.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	683.456.363
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.223.443.600
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.223.443.600
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	363.443.600
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	10.860.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.945.601.290
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.945.601.290
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.945.601.290
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.953.510.917
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.953.510.917

5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.953.510.917
5.1.03	Belanja Bunga	1.650.000.000
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	1.650.000.000
5.1.03.03.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	1.650.000.000
5.1.03.03.05.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	1.650.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	32.717.608.595
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.600.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.100.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.100.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	500.000.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	500.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.525.768.595
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.101.111.592
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.196.650.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.904.461.592
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.424.657.003
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.129.400.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.295.257.003
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	7.641.360.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.440.060.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.440.060.000
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	201.300.000
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	201.300.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.950.480.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.950.480.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.950.480.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.639.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.259.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.259.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.259.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	380.000.000

5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	380.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	380.000.000
5.2	BELANJA MODAL	246.546.432.328
5.2.01	Belanja Modal Tanah	381.008.500
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	381.008.500
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	179.408.500
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	179.408.500
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	201.600.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	201.600.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.078.392.819
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	197.140.091
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	157.726.400
5.2.02.01.01.0006	Belanja Modal Asphalt Equipment	49.500.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	108.226.400
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	39.413.691
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	13.471.566
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	10.278.125
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	15.664.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.749.816.572
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.738.264.800
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	749.999.800
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	550.000.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.210.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	210.000.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	37.250.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	7.981.015.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	11.551.772
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	11.551.772
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	109.584.498
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	102.442.000
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	2.442.000

5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	100.000.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.202.498
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	1.202.498
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	5.940.000
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	5.940.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	65.148.666
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	65.148.666
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	34.218.666
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	3.080.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	27.850.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.369.930.529
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	540.311.805
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	270.677.950
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	269.633.855
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.706.378.972
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.573.336.590
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	63.848.301
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	768.629.541
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	24.937.418
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	991.433.722
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	284.193.400
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	123.239.752
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	40.790.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	77.499.752
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.950.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.193.099.970
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	92.850.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	89.000.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.850.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	100.249.970
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	100.249.970

5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	4.000.000.000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	4.000.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.365.509.019
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.265.509.019
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	819.395.672
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.704.540
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.751.503.948
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	2.027.403.778
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	665.501.081
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	100.000.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	100.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.587.244.094
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.874.507.800
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	2.312.713.766
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	561.794.034
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	7.499.680.000
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	743.110.000
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	6.670.000.000
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	50.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	36.570.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	213.056.294
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	213.056.294
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.023.206.279
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.167.966.604
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	59.400.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.762.623.570
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	345.943.034
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	855.239.675
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	500.039.777
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	54.200.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	300.999.898

5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	176.257.421
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	169.800.000
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	19.800.000
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	150.000.000
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	6.457.421
5.2.02.15.04.0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faslektrik	6.457.421
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	100.000.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	100.000.000
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	100.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	22.807.970
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	22.807.970
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	9.830.730
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	12.977.240
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.618.647.710
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.618.647.710
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.618.647.710
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.500.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.500.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.500.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.531.734.341
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	83.364.231.273
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	78.638.887.328
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.568.308.936
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.369.232.500
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	100.000.000
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.083.153.281
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	30.636.418.545
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	20.628.921.822
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.094.171.471
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	40.611.855
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	256.904.400

5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	349.992.616
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.771.768.688
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.739.403.214
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.725.343.945
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	2.657.873.897
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.859.500.000
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	207.970.048
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	214.159.261
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	214.159.261
5.2.03.03.01.0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	214.159.261
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	520.004.800
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	520.004.800
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	520.004.800
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.433.339.007
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.433.339.007
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.433.339.007
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.494.914.118
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	82.807.348.882
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	76.921.841.105
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	76.374.687.755
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	547.153.350
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	5.885.507.777
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.706.794.748
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	1.003.721.570
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	174.991.459
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.472.713.324
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.394.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	412.000.000
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	200.000.000
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	782.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.450.000.000

5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.450.000.000
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.006.000.000
5.2.04.02.05.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	1.006.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	6.622.713.324
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	6.408.345.824
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	214.367.500
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	977.820.128
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	366.736.800
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	366.736.800
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	557.750.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	557.750.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	53.333.328
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	53.333.328
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	5.237.031.784
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.845.513.000
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	4.845.513.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	391.518.784
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	391.518.784
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.060.382.550
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	178.186.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	130.186.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	27.050.000
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	10.800.000
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	14.400.000
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	11.250.000
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	13.500.000
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	11.250.000
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	11.250.000
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	6.750.000
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	6.750.000
5.2.05.01.01.0010	Belanja Modal Serial	9.122.000

5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	8.064.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	48.000.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	48.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	50.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	50.000.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	30.800.000
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	19.200.000
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	75.000.000
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	75.000.000
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	75.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	757.196.550
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	757.196.550
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	327.206.550
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	300.000.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	129.990.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.559.675.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.559.675.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.559.675.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.559.675.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.559.675.000
5.4	BELANJA TRANSFER	152.638.440.900
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.684.632.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.994.780.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.994.780.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.994.780.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.689.852.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.689.852.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.689.852.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	138.953.808.900
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	245.000.000
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	245.000.000

5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	245.000.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	138.708.808.900
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	67.807.684.900
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	67.807.684.900
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	70.901.124.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	70.901.124.000
	Jumlah Belanja	1.361.138.069.100
	Total Surplus/(Defisit)	31.875.142.800
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.124.857.200
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.124.857.200
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	16.321.921.000
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	16.321.921.000
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	1.500.000.000
6.1.01.02.01.0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	14.821.921.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	4.500.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	3.500.000.000
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	2.000.000.000
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	1.500.000.000
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
6.1.01.06	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	302.936.200
6.1.01.06.01	Uang Jaminan	302.936.200
6.1.01.06.01.0001	Uang Jaminan	302.936.200
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	21.124.857.200
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	53.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000

6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.000.000.000
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	33.000.000.000
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	33.000.000.000
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	33.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	53.000.000.000
	Pembiayaan Netto	(31.875.142.800)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 2000501 1 010